



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK-1/DPRD/1/2023

NOMOR : 180/ 2 /SKB-HK/2023

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP 14 (EMPAT BELAS) BUAH RAPERDA
DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-62/DPRD/PPII/100.3.2/1/2023 Perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda Tahun 2023, Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.218/HK-PerUU/IX/2022 tentang Pengajuan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Transportasi dan Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180/HK-PerUU/X/2022 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Raperda diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 1);
- Memperhatikan :
- Rapat Paripurna ke - 2 Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 16 Januari 2023 tentang Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

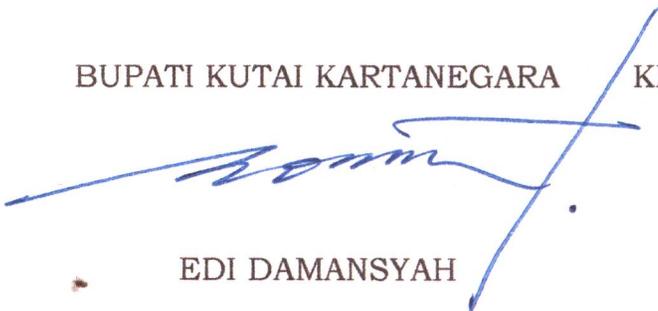
MENETAPKAN :

- KESATU : Menyetujui Keputusan Bersama terhadap 14 (Empat Belas) buah Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebagai dasar Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEDUA : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Lampiran Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini Bisa diubah berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- KEEMPAT : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal, 16 Januari 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


EDI DAMANSYAH



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda
2. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

NOMOR : 170 /SK-1/DPRD/1/2023

NOMOR : 180 / 2 /SKB-HK/2023

TANGGAL : 16 JANUARI 2023

RAPERDA DILUAR PROPEMPEDA KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

NO	JUDUL PERATURAN	SIFAT	PELAKSANAAN PEMBAHASAN	INSTANSI/ INDIKATOR	PENYAMPAIAN KE DPRD TAHUN	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan		2021		Diusulikan kembali tahun 2023	Diusulikan untuk dilakukan persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan		2021		Diusulikan kembali tahun 2023	Diusulikan untuk dilakukan persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perparkiran		2021		Diusulikan kembali tahun 2023	Diusulikan untuk dilakukan persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Produk Lokal		2022			
5.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		2022		Diusulikan kembali tahun 2023	Diusulikan untuk dilakukan persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda

6.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	Daerah	2022	Diusulkan kembali tahun 2023	Diusulkan untuk dilakukan persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda
7.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Daerah	2022	Diusulkan kembali tahun 2023	Diusulkan untuk dilakukan persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda
8.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2024	Daerah	2021	Diusulkan kembali tahun 2023	Diusulkan untuk dilakukan persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda
9.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Petani dan Nelayan	Daerah	2022	Diusulkan kembali tahun 2023	Diusulkan untuk dilakukan persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda
10.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau	Daerah	2020	Diusulkan kembali tahun 2023	Diusulkan untuk dilakukan persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda
11.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara	Daerah	2021	Diusulkan kembali tahun 2023	Diusulkan untuk dilakukan persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda

12.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2026		2022		Diusulikan kembali tahun 2023	Diusulikan untuk dilakukan persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda
13.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kutai Kartanegara No. 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi	Ubah	2023	Dimas Perhubungan	Tahun 2022	Diusulikan untuk dilakukan Pembahasan
14.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten Kutai Kartanegara	Ubah	2023	Bagian Kesra Setda Kab. Kutai Kartanegara	Tahun 2022	Diusulikan untuk dilakukan Pembahasan


BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH


**KEJUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ABDOL RASID